

BAB I

PENDAHALUAN

1.1.Latar Belakang

Pemerintah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan kurang mampu, yaitu mulai dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang dianggap belum berjalan efektif sehingga pemerintah membentuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Pelayanan Kesehatan merupakan hak yang mendasar bagi seluruh masyarakat, dimana pelayanan yang dibutuhkan harus disediakan dan dijamin oleh pemerintah Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 28 H ayat (1) dan ayat (3) berbunyi (1) “ bahwa setiap orang berhak hidup Sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan “ (3) “ setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” (Adhikari, 2021).

Jaminan kesehatan bertujuan untuk menjamin perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap masyarakat yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayar oleh Pemerintah. Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo tanggal 3 november 2014 mengeluarkan program kesehatan yaitu program Kartu Indonesia Sehat (KIS), dimana KIS ini berfungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. KIS dan BPJS merupakan sama - sama program kesehatan dari pemerintah, namun yang membedakan antara keduanya yakni BPJS merupakan program yang dimana anggotanya harus mendaftar dan membayar iuran sendiri (mandiri). Sedangkan KIS anggotanya adalah masyarakat yang tidak mampu dipilih oleh pemerintah.

Undang - Undang yang menjadi dasar diterbitkannya Kartu Indonesia Sehat (KIS) yaitu: UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan adalah badan yang menyelenggarakan, sedangkan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

adalah programnya. Sebaik apapun sebuah implementasi kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan, termasuk sektor pelayanan kesehatan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat tidak akan semudah yang diperkirakan atau dibayangkan. Hal ini karena bergunanya aspek permasalahan kesehatan yang berhadapan dengan kepentingan umum sejak kebijakan atau rangkaian konsep pelaksanaan berlangsung tetapi perubahan arah kebijakan sering terjadi pada setiap periode pergantian kepemimpinan.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunaannya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program keesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan oleh mantan Presiden SBY (Sosilo Bambang Yudhoyono) pada tanggal 1 Maret 2014 kemarin. Sama - sama sebagai program fasilitas kesehatan dari negara, ternyata KIS dan BPS kesehatan memang memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya sebenarnya nampak yang jelas pada sasaran atau orang yang menerimanya. Jika BPJS merupakan sebuah program yang anggotanya harus mendaftar dan membayar iuran, maka KIS anggotanya diambil dari masyarakat yang tidak mampu dan pemberian kartunya ditetapkan oleh pemerintah serta pembayaran urannya ditanggung oleh pemerintah. (Cishum, 2023).

Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat yang masuk dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu. Sasaran KIS adalah mereka yang tergolong dalam dua kategori tersebut, hal ini dikarenakan angka di negara ini yang masih sulit ditekan. (Haughton (2012:3) menyatakan bahwa “kemiskinan timbul akibat masyarakat tidak memiliki kemampuan - kemampuan utama, tidak memiliki pendapatan atau mendapatkan pendidikan yang memadai, memiliki kondisi kesehatan yang buruk, merasa tidak aman, memiliki kepercayaan - kepercayaan diri dengan rendah,” KIS merupakan kartu yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan sosial dan kesehatan agar

masyarakat dapat berobat secara gratis di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Kartu Indonesia Sehat (KIS) Menjamin dan Memastikan masyarakat Kurang Mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS. (Cishum, 2023).

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan, dan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. BPJS Sebagai penyelenggara melalui pemerintah Desa Bioba Baru dalam pengimplementasian Program KIS tidak lepas dari berbagai masalah. Program KIS ini yang ditangani langsung oleh Desa berdasarkan data yang tercatat di Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang Tahun 2019 – 2023.

Tabel 1. 1 Jumlah Peserta Penerima Program KIS

Tahun	Jumlah penerima program KIS		Total
	Laki- laki	Perempuan	
2019	411	490	901
2020	413	492	905
2021	418	497	915
2022	423	502	925
2023	425	504	929

Program ini tidak lepas dari berbagai masalah, permasalahan yang dihadapi dan pelaksanaan KIS tersebut yakni masyarakat mengeluh dikarenakan program KIS ini kebanyakan didapatkan oleh masyarakat yang ekonominya menengah keatas. masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui keberadaan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi. Masih ada sebagian yang tergolong miskin belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik menulis judul: **“Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi Masyarakat Miskin Dan Kurang Mampu Di Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat, Daya Kabupaten Kupang Tahun 2019 - 2023?
2. Apa saja faktor - faktor penghambat Program Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang Tahun 2019 - 2023?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Program Indonesia Sehat (KIS) di Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang Tahun 2019 - 2023.
2. Untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Barat Daya, Kabupaten Kupang Tahun 2019 - 2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara subyektif, bermanfaat bagi peneliti dalam melati dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, dan sistem dalam mengembangkan kemampuan penulis khususnya berkaitan dengan implementasi pelayanan publik
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan masukan yang berguna bagi masyarakat terkait memberikan pelayan baik kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya.
3. Secara akademis, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagian bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.